

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 2 TAHUN 2023



TENTANG
OPERATOR SID
TAHUN 2023
DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR :141/ 2 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SID DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DESA KUTASARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tata kelola kearsipan Desa maka perlu mengangkat Operator SID Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 114 Tahun 2022 tentang Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital;
10. Peraturan Desa Kutasari Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2023;
11. Peraturan Desa Kutasari No 6 tahun 2022 tentang rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SID DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
- KESATU : Menetapkan
Nama : SOFYAN ARIYANTO,AMD
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Sebagai Operator SID Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
- KEDUA : Operator SID sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas Mengentri data serta mengembangkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Operator Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KUTASARI
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA KUTASARI



BASOEKI KADANG DEWA, SE

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat Kutasari
2. Ketua BPD Desa Kutasari
3. Ybs
4. Arsip



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 02.1 TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA**

**DESA : KUTASARI
KECAMATAN : KUTASARI
KABUPATEN : PURBALINGGA
TAHUN : 2023**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI
NOMOR : 02.1/ 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DI DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTASARI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa tahun anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, serta memberikan landasan hukum yang memadai bagi Kader Pembangunan Manusia di Desa dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07 /2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Surat Keputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

- **Memperhatikan** : Hasil Kesepakatan Musyawarah pada tanggal 2 Januari 2023 yang telah memilih dan menetapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU** : Membentuk Kader Pembangunan Manusia di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.
- KETIGA** : Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berjumlah sebanyak 1 (satu) orang per-Desa.
- KEEMPAT** : Kriteria Kader Pembangunan Manusia sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
 - a. Berasal dari warga masyarakat Kabupaten Purbalingga;
 - b. Berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya;
 - c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat;
 - d. Pendidikan minimal SLTP.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Kader Pembangunan Manusia sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
 - a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
 - b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
 - c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan

pengecanaan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;

- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti badan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/ atau perangkat Desa.

KEENAM : Mekanisme pemilihan Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya;
- b. KPM dipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan Dusun/RT/RW, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/ atau pendidikan;
- c. Rapat kerja dimaksud dilakukan secara demokratis dan hasilnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kutasari .

KEDELAPAN : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) .

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Alokasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutasari
Pada tanggal : 3 Februari 2024

KEPALA DESA KUTASARI

BASOEKI KADANG DEWA , SE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga ;
- 2) Camat Kutasari
- 3) TPID Kecamatan Kutasari
- 4) Petikan disampaikan kepada Kader Pembangunan Manusia yang bersangkutan.
- 5) Arsip